

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH GAMPONG (RPJMG)
(Studi Gampong Gunong Kleng
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial

Oleh :

**MARLIANA
NIM : 06C20201059**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
2013**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Skripsi/tugas akhir : Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG)
(Studi Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)

Nama Mahasiswa : **MARLIANA**

NIM : 06C20201059

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Sudarman Alwy, M.Ag
NIDN. 01-2504-7601

Maria Baren, MM

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Dekan
Fekultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Saiful Asra, M. Soc, Sc
NIDN.

Sudarman Alwy, M.Ag
NIDN. 01-2504-7601

Tanggal Sidang :

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Dengan Judul

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG (RPJMG)
(Studi Gampong Gunong Kleng
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)**

Yang disusun oleh :
Nama : **MARLIANA**
NIM : 06C20201059
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah dipertahankan di depan Komisi Penguji pada tanggal Februari 2013 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

KOMISI PENGUJI

1. Said Fadhlain
NIDN. 01-0501-7003 Ketua

2. Drs. Tabrani
NIY. 12A.0028 Anggota I

3. Nurlian, S.Sos
NIDN. 01-2404-8202 Anggota II

4. Hilda Syahfitri Srg, SE
NIDN. 01-2208-8102 Anggota III

Alue peunyareng, 28 Februari 2013
Ketua Program Studi
Ilmu Sosiologi

Nurlian, S.Sos
NIDN. 01-2404-8202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG (RPJMG)** (Studi Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat).

Nama Mahasiswa : **Marliana**
NIM : **06C20201059**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Sudarman Alwy, M. Ag

In Mutia, S. Sos

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Teuku Umar

Ketua Jurusan Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Sudarman Alwy, M. Ag

Nellis Mardhiah, S. Sos

Tanggal Lulus :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi Strata 1 atau S-1 pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Penyusunan Skripsi yang berjudul “**Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG)** (Studi Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat) “ tidak lepas dari bimbingan, bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak tersebut sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut penulis menyampaikan hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Alfian Ibrahim, M.Si, selaku Rektor Universitas Teuku Umar
2. Bapak Sudarman Alwy, S.Ag. M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, sekaligus pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing dengan sabar.
3. Saiful Asra, M.Soc.Sc, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Ibu In Mutia, S.Sos Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan petunjuk, serta dorongan semangat dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Para Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

6. Bapak Norman, Keuchik Gampong Gunong Kleng dan seluruh aparat Gampong, yang telah memberikan izin penelitian.
7. Kepada suamiku tercinta yang telah memberikan motivasi, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Pada Kedua orang tua yang selalu mendoakan di dalam setiap sujudnya, serta keluarga yang telah memberikan motivasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu setia menemani dan membantu penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki kekurangan/keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Alue Peunyareng, Februari 2013
Penulis

MARLIANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	ii
ABSTRAK	iii
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.1.1 Penelitian Andi Sayumitra (2009).....	6
2.2 Partisipasi Masyarakat.....	7
2.2.1 Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat	9
2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	10
2.2.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat	13
2.2 Pengertian Masyarakat	18
2.4 Pengertian Pembangunan	20
2.5 Tujuan Pembangunan	22
2.6 Pengertian Gampong	23
2.7 Partisipasi masyarakat terhadap Rencana pembangunan Gampong	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Metode Penelitian	30
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan data.....	30
3.2.1 Sumber Data.....	30
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	31
3.3 Jadwal Penelitian.....	34
3.4 Instrumen Penelitian.....	35
3.5 Teknik Analisa Data.....	35
3.6 Pengujian Kredibilitas Data	37
3.7 Teknik Penentuan Informan	40

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1.1 Kondisi Geografis.....	42
4.1.1.2 Kondisi Demografis.....	45
4.1.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi	46
4.1.2 Partisipasi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) di Gampong Gunong Kleng	49
4.1.2.1 Partisipasi Masyarakat Pada Tahap perencanaan	49
4.1.2.2 Partisipasi Masyarakat Pada Tahap pelaksanaan.....	52
4.1.2.3 Partisipasi Masyarakat Pada Tahap pengawasan.....	56
4.2 Pembahasan	59
4.2.1 Partisipasi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) di Gampong Gunong Kleng	59
4.2.1.1 Partisipasi Masyarakat Pada Tahap perencanaan.....	59
4.2.1.2 Partisipasi Masyarakat Pada Tahap pelaksanaan	61
4.2.1.3 Partisipasi Masyarakat Pada Tahap pengawasan	63
 BAB V PENUTUP.....	 67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	34
Tabel 4.1 Jarak Gampong dengan pemerintahan dan sarana vital.....	43
Tabel 4.2 Klasifikasi Penduduk Menurut Kelompok Umur	45
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk di Gampong Gunong Kleng	46
Tabel 4.4 Jumlah penduduk Gampong Gunong Kleng berdasarkan Pendidikan.....	47
Tebel 4.5 Fasilitas Sosial dan Eknomi Gampong Gunong Kleng	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara
- Lampiran II : Surat permohonan izin penelitian
- Lampiran III : Surat izin penelitian dari Gampong
- Lampiran IV : Daftar nama-nama perumus RPJMG
- Lampiran V : Daftar rumusan RPJMG
- Lampiran VI : Kartu Konsul Skripsi

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG)**
(Studi Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)

Nama Mahasiswa : MARLIANA
Nim : 06C20201059
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Sudarman Alwy, M.Ag
NIDN. 01-2612-6501

In Mutia,S.Sos
NIDN. 01-1110-47503

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Teuku Umar

Ketua Jurusan Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Sudarman Alwy, M.Ag
NIDN. 01-2612-6501

Saiful Asra, M.Soc.Sc
NIDN. 01-1305-8201

Tanggal Sidang : 7 Maret 2013

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Dengan Judul

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH GAMPONG (RPJMG)
(Studi Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo
Kabupaten Aceh Barat)**

Yang disusun oleh :

Nama : MARLIANA

NIM : 06C20201059

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah dipertahankan di depan Komisi Penguji pada tanggal 7 Maret 2013 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

KOMISI PENGUJI

1. Sudarman Alwy, M. Ag
NIDN. 01-2612-6501 Ketua
2. In Mutia, S.Sos
NIDN. 01-1110-47503 Sekretaris
3. Hilda Syahfitri Srg, SE
NIDN. 01-2208-8102 Anggota I
4. Nurlian, S.Sos
NIDN. 01-2404-8202 Anggota II
5. Fiandy Mauliansyah, S. I.Kom
Anggota III

Alue Peunyareng, 7 Maret 2013
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Saiful Asra, M. Soc.Sc
NIDN. 01-1305-8201

ABSTRAK

Marliana. Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) di Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Di bawah bimbingan Sudarman Alwy dan In Mutia.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan dan partisipasi pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Penelitian ini berjudul partisipasi masyarakat terhadap rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG) di Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana partisipasi masyarakat terhadap rencana pembangunan jangka menengah gampong di Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat terhadap rencana pembangunan jangka menengah gampong di Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisa data berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat terhadap rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG) di Gampong Gunong Kleng, bahwa dari hasil wawancara dan observasi maka dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat Gampong Gunong Kleng dalam merumuskan rencana pembangunan jangka menengah gampong masih kurang aktif, sebab masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan perumusan hasil musyawarah rencana pembangunan jangka menengah gampong.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan zaman. Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pertama (1): perlu aspiratif terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya, dan perlu sensitif terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauan rakyat. Ke dua (2): pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergis. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-

produk baru yang kurang berarti bagi masyarakat, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi yang merosot tajam di dalam masyarakat. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan di mana peran pemerintah dan di mana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.

Adanya rencana untuk melibatkan masyarakat bukan hanya pada tataran perencanaan tetapi juga pada penganggaran merupakan suatu hal yang positif dalam proses transparansi yang coba dibangun oleh pemerintah. Proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan telah dicoba respon oleh berbagai daerah. Dalam proses perencanaan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, proses pelibatan masyarakat tersebut dikenal dengan nama musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang). Lebih jauh lagi, Musrembang ini merupakan forum antara pelaku dalam menyusun perencanaan pembangunan. Istilah nama tersebut berkembang di tiap daerah disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan.

Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan

memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati dan menjaga produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

Proses perencanaan yang ada dimulai dari penggalian opini masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di daerahnya. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka peran masyarakat tidak begitu besar. Perubahan ini terjadi karena masyarakat di tiap daerah dituntut dan merasa perlu berperan dalam perkembangan daerahnya. Hal ini sesuai dengan amanat otonomi daerah yang menginginkan masyarakat untuk terlibat aktif memberikan masukan penyusunan APBD (Cahyono, 2003: h.24).

Sama halnya dengan wacana keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan jangka menengah gampong di Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, merupakan suatu hal perlu dilaksanakan, sebab dengan keterlibatan masyarakatlah pembangunan dapat berjalan dengan baik. Keterlibatan masyarakat terhadap rencana pembangunan jangka menengah gampong di gampong Gunong Kleng, selama ini masih mendapat kendala, karena kesibukan masing-masing dengan rutinitas masyarakat yang padat. Hal ini tentu merupakan sebuah masalah yang menjadi penghambat proses pelaksanaan pembangunan, karena partisipasi masyarakat Gampong Gunong Kleng sangat

diharapkan. Perumusan rencana pembangunan jangka menengah Gampong Gunong Kleng selama ini tidak terlalu maksimal dijalankan, karena kurangnya tingkat partisipasi masyarakat.

Gampong Gunong Kleng merupakan salah satu gampong yang telah mencoba menerapkan proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan partisipatif. Partisipasi masyarakat Gampong Gunong Kleng tentu memiliki pengalaman berbeda disesuaikan dengan keadaan tiap gampong yang mempunyai ciri khas tertentu. Tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan jangka menengah gampong di Gampong Gunong Kleng secara sinergis diterapkan untuk Tahun Anggaran 2011. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka menengah gampong tersebut mencerminkan hubungan masyarakat sebagai penyumbang pemasukan APBG. Usulan yang telah disampaikan masyarakat dalam tahapan perencanaan patut direspon oleh Pemerintah sehingga kegiatan yang direalisasikan dalam ADG merupakan wujud aspirasi masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraannya. Tujuan umum yang ingin dicapai dari keterlibatan masyarakat dalam bidang rencana pembangunan jangka menengah Gampong adalah terciptanya suatu kondisi anggaran yang murni sehingga dapat menciptakan mekanisme pelaksanaan anggaran yang transparan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG)** (Studi Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana partisipasi masyarakat terhadap rencana pembangunan jangka menengah gampong di Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat terhadap rencana pembangunan jangka menengah gampong di Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum untuk menambah khasanah pengetahuan ilmiah khususnya di program studi ilmu Administrasi Negara dan dapat meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan penulis selama melaksanakan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan sebagai kontribusi terhadap pemecahan masalah terkait yakni rencana pembangunan jangka menengah gampong.
- b. Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan berfikir dan memecahkan suatu permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Penelitian Andi Sayumitra (2009)

Penelitian yang berjudul Implementasi Perencanaan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pembangunan di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian Mahasiswa Jurusan Adminitrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, Medan, Tahun 2009. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat rendah, hal ini disebabkan oleh kondisi musrenbang yang sampai saat ini belum memberikan hasil bagi masyarakat. Masyarakat telah pesimis dengan perencanaan partisipatif dan menganggap bahwa perencanaan partisipatif tidak akan memberikan dampak yang positif bagi pembangunan desa. Musrenbang merupakan suatu forum bagi masyarakat desa dalam merencanakan apa yang menjadi kebutuhannya dalam pembangunan desa.

Penelitian Andi Sayumitra memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang perencanaan partisipatif dalam mewujudkan pembangunan, penelitian ini lebih berfokus pada perencanaan partisipatif sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai partisipasi masyarakat tentang rencana pembangunan jangka menengah gampong. Adapun persamaan penelitian ini

adalah sama-sama membahas pembangunan desa atau rencana pembangunan gampong.

2.2 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang diucapkan para ahli maupun orang awam. Sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang yang dipakai dalam memberikan pengertian atau definisi.

Dari kajian literatur tentang partisipasi masyarakat di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa konsep partisipasi diinterpretasikan secara luas, seperti yang disampaikan Cohen dan Uphoff (2007: h.20) bahwa:

Partisipasi dapat dilihat dari berbagai pandangan (*perspective*) keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dalam mengimplementasikan program, serta menikmati keuntungan-keuntungan dari program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi program, suatu proses aktif, dimana rakyat dari suatu komunitas mengambil inisiatif dan menyatakan dengan tegas otonomi mereka.

Menurut FAO seperti yang dikutip Mikkelsen (2001: h.64) berbagai penafsiran yang berbeda dan sangat beragam mengenai arti kata tentang partisipasi yaitu :

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

3. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial.
4. Partisipasi adalah ketertiban sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Menurut Hall (2006: h.9) partisipasi masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang memandang masyarakat dalam konteks dinamis yang mampu memobilisasi sumber daya sesuai dengan kepentingan, kemampuan dan aspirasi yang dimiliki, baik secara individu maupun komunal.

Fitriastuti (2005: h.41) mengatakan bahwa:

Partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa keuangan, pemikiran dan material yang diperlukan.

Menurut Slamet (2003: h.35) partisipasi merupakan keterlibatan aktif dan bermakna dari masa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda, yaitu:

- a. Dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Dalam pelaksanaan program-program atau proyek-proyek secara sukarela

- c. Dalam pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek (sesuai dengan azas pembangunan yaitu pembagian yang merata atas hasil pembangunan).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Dalam melaksanakan suatu kegiatan; lebih secara langsung maupun tak langsung.

2.2.1 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Keith Davis dalam Sastropetro (2008: h.16) bentuk-bentuk partisipasi meliputi:

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang.
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari pihak ketiga
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh masyarakat.
5. Sumbangan dalam bentuk kerja.
6. Aksi massa.
7. Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga.
8. Membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom.

Adapun jenis-jenis partisipasinya meliputi: (1) Pikiran (2) Tenaga (3) Pikiran dan tenaga (4) Keahlian (5) Barang dan (6) Uang. Dari jenis-jenis partisipasi tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pikiran merupakan jenis partisipasi pada level pertama dimana partisipasi tersebut merupakan partisipasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
2. Tenaga merupakan jenis partisipasi pada level kedua dimana partisipasi tersebut dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
3. Pikiran dan Tenaga merupakan jenis partisipasi pada level ketiga dimana tingkat partisipasi tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama. Biasanya konteks partisipasi tersebut berada pada suatu lembaga atau partai.
4. Keahlian merupakan jenis partisipasi pada level keempat dimana dalam hal tersebut keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan.
5. Barang: merupakan jenis partisipasi pada level kelima dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan.
6. Uang merupakan jenis partisipasi pada level keenam dimana partisipasi tersebut menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Biasanya tingkat partisipasi tersebut dilakukan oleh orang-orang pada kalangan atas.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet (2003: h.97) faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat

pendapatan, dan mata pencaharian. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri. Secara teoritis, tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh:

a. Jenis Kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita.

Menurut Soetomo (2006: h.34) bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya, kelompok pria akan lebih banyak berpartisipasi.

b. Usia

Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi. Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dalam hal menetapkan keputusan. (Slamet, 2003: h.142).

c. Tingkat Pendidikan

Demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan salah satu karakteristik partisipasi dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi.

d. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat hanya akan bersedia untuk menyerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka.

e. Mata Pencaharian

Hal ini berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat mempengaruhi partisipasi

masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya.

Menurut Soetomo (2006: h.35) faktor-faktor eksternal dapat dikatakan sebagai pengaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program.

Adapun faktor-faktor eksternal dalam penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) adalah pemerintah dan swasta (LSM).

2.2.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Menurut Sherry Arnstein dalam (Slamet, 2003: h.56) bahwa terdapat delapan Jenis tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan, seperti berikut:

1. Manipulasi (*Manipulation*)

Pada tingkat ini partisipasi masyarakat berada di tingkat yang sangat rendah. Bukan hanya tidak berdaya, akan tetapi pemegang kekuasaan memanipulasi partisipasi masyarakat melalui sebuah program untuk mendapatkan “persetujuan” dari masyarakat. Masyarakat sering ditempatkan sebagai komite atau badan penasehat dengan maksud sebagai “pembelajaran” atau untuk merekayasa dukungan mereka. Partisipasi masyarakat dijadikan kendaraan *public relation* oleh pemegang kekuasaan. Praktek pada tingkatan ini biasanya adalah program-program pembaharuan desa. Masyarakat diundang untuk terlibat dalam komite atau badan penasehat dan sub-sub komitenya. Pemegang kekuasaan

memanipulasi fungsi komite dengan “pengumpulan informasi”, “hubungan masyarakat” dan “dukungan.” Dengan melibatkan masyarakat di dalam komite, pemegang kekuasaan mengklaim bahwa program sangat dibutuhkan dan didukung. Pada kenyataannya, hal ini merupakan alasan utama kegagalan dari program-program pembaharuan pedesaan di berbagai daerah.

2. Terapi (*Therapy*)

Untuk tingkatan ini, kata “terapi” digunakan untuk merawat penyakit. Ketidakberdayaan adalah penyakit mental. Terapi dilakukan untuk menyembuhkan “penyakit” masyarakat. Pada kenyataannya, penyakit masyarakat terjadi sejak distribusi kekuasaan antara ras atau status ekonomi (kaya dan miskin) tidak pernah seimbang.

3. Pemberian Informasi (*Informing*)

Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan transisi antara tidak ada partisipasi dengan tokenism. Kita dapat melihat dua karakteristik yang bercampur yaitu:

- 1) Pemberian informasi mengenai hak-hak, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan masyarakat adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat.
- 2) Pemberian informasi ini terjadi hanya merupakan informasi satu arah (tentunya dari aparat pemerintah kepada masyarakat). Akan tetapi tidak ada umpan balik (*feedback*) dari masyarakat. Alat yang sering digunakan dalam komunikasi satu arah adalah media massa, pamflet, poster, dan respon untuk bertanya.

4. Konsultasi (*Consultation*)

Konsultasi dan mengundang pendapat-pendapat masyarakat merupakan langkah selanjutnya setelah pemberian informasi. Langkah ini dapat menjadi langkah yang sah menuju tingkat partisipasi penuh. Namun, komunikasi dua arah ini sifatnya tetap buatan (*artificial*) karena tidak ada jaminan perhatian-perhatian masyarakat dan ide-ide akan dijadikan bahan pertimbangan. Metode yang biasanya digunakan pada konsultasi masyarakat adalah survei mengenai perilaku, pertemuan antar tetangga, dan dengar pendapat.

Di sini partisipasi tetap menjadi sebuah ritual yang semu. Masyarakat pada umumnya hanya menerima gambaran statistik, dan partisipasi merupakan suatu penekanan pada berapa jumlah orang yang datang pada pertemuan, membawa pulang brosur-brosur, atau menjawab sebuah kuesioner.

5. Penentruman (*Placation*)

Strategi penentruman menempatkan sangat sedikit masyarakat pada badan-badan urusan masyarakat atau pada badan-badan pemerintah. Pada umumnya mayoritas masih dipegang oleh elit kekuasaan. Masyarakat dapat dengan mudah dikalahkan dalam pemilihan atau ditipu. Dengan kata lain, mereka membiarkan masyarakat untuk memberikan saran-saran atau rencana tambahan, tetapi pemegang kekuasaan tetap berhak untuk menentukan legitimasi atau fisibilitas dari saran-saran tersebut. Ada dua tingkatan dimana masyarakat ditentramkan, yaitu:

- 1) Kualitas pada bantuan teknis yang mereka miliki dalam membicarakan prioritas-prioritas mereka.

- 2) Tambahan dimana masyarakat diatur untuk menekan prioritas-prioritas tersebut.

6. Kemitraan (*Partnership*)

Pada tingkat kemitraan, partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Kekuatan tawar menawar pada tingkat ini adalah alat dari elit kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Kedua pemeran tersebut sepakat untuk membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui badan kerjasama, komite-komite perencanaan, dan mekanisme untuk memecahkan masalah. Beberapa kondisi untuk membuat kemitraan menjadi efektif adalah:

- 1) Adanya sebuah dasar kekuatan yang terorganisir di dalam masyarakat dimana pemimpin-pemimpinnya akuntabel.
- 2) pada saat kelompok memiliki sumber daya keuangan untuk membayar pemimpinnya, diberikan honor yang masuk akan atas usaha-usaha mereka.
- 3) ketika kelompok memiliki sumber daya untuk menyewa dan mempekerjakan teknisi, pengacara, dan manajer (*community organizer*) mereka sendiri.

7. Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*)

Pada tingkat ini, masyarakat memegang kekuasaan yang signifikan untuk menentukan program-program pembangunan. Untuk memecahkan perbedaan-perbedaan, pemegang kekuasaan perlu untuk memulai proses tawar menawar dibandingkan dengan memberikan respon yang menekan.

8. Pengawasan Masyarakat (*Citizen Control*)

Pada tingkat tertinggi ini, partisipasi masyarakat berada di tingkat yang maksimum. Pengawasan masyarakat di setiap sektor meningkat. Masyarakat meminta dengan mudah tingkat kekuasaan (atau pengawasan) yang menjamin partisipasi dan penduduk dapat menjalankan sebuah program atau suatu lembaga akan berkuasa penuh baik dalam aspek kebijakan maupun untuk menegosiasikan kondisi pada saat di mana pihak luar bisa menggantikan mereka.

Pada tingkat 1 dan 2 disimpulkan sebagai tingkat yang bukan partisipasi (*non participation*). Tingkat 3, 4, dan 5 disebut *Degree of Tokenism* (tingkat penghargaan). Dan tingkat 6, 7, dan 8 disebut dengan *Degree of Citezen Power* (tingkatan kekuatan masyarakat). Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengukur tingkat partisipasi individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan bersama-sama yang dapat diukur dengan skala yang dikemukakan oleh Chapin dalam Slamet (2003: h.82-83), yaitu:

- a. Keanggotaan dalam organisasi.
- b. Kehadiran di dalam pertemuan.
- c. Sumbangan-sumbangan.
- d. Keanggotaan di dalam kepengurusan.
- e. Kedudukan anggota di dalam kepengurusan.

Sementara Goldhamer dalam Slamet (2003: h.84) bahwa untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan lima variabel yaitu:

- a. Jumlah asosiasi yang dimasuki.
- b. Frekuensi kehadiran.

- c. Jumlah asosiasi dimana dia memangku jabatan.
- d. Lamanya menjadi anggota.
- e. Tipe asosiasi yang dimasuki.

Berdasarkan skala partisipasi individu tersebut, maka dapat diklasifikasikan skala yang digunakan sebagai variabel untuk mengukur partisipasi masyarakat pada pembangunan prasarana lingkungan melalui program pemberdayaan masyarakat kelurahan (PPMK) yang meliputi pembangunan jalan dan jembatan, sanitasi dan penyediaan sarana kebersihan, menurut C. Ericson dalam Slamet (2003: h.89) adalah:

Partisipasi di dalam tahap perencanaan meliputi:

- 1) Tingkat kehadiran dalam rapat/pertemuan.
 - 2) Keaktifan dalam mengajukan saran/usul.
 - 3) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
- a) Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan. Bentuk partisipasi diperinci dalam bentuk tenaga, uang dan material ataupun dalam bentuk lainnya;
 - b) Partisipasi di dalam tahap pengawasan prasarana. Dalam tahap ini adalah akan melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan prasarana secara menyeluruh dan kesesuaian pembangunan prasarana di lapangan dengan rencana yang ditetapkan.

2.3 Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi. Suatu kesatuan masyarakat dapat memiliki prasarana yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi. Suatu negara modern adalah contoh dari suatu

kesatuan manusia yang memiliki berbagai jenis prasarana, seperti misalnya suatu jaringan komunikasi berupa jaringan jalan raya, kereta api, perhubungan udara, media elektronika, media cetak, sistem upacara dan lain-lain. Sehingga warga suatu negara dengan wilayah yang kecil tentu memiliki potensi untuk berinteraksi secara lebih intensif dari pada warga dari suatu negara yang sangat luas. (Koentjaraningrat, 2004: h.120).

Masyarakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu masyarakat pedesaan (*rural community*) dan masyarakat perkotaan (*urban community*). Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan (*rural community*) dengan masyarakat perkotaan (*urban community*). Perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana karena dalam masyarakat modern berapapun kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Sebaliknya pada masyarakat bersahaja pengaruh-pengaruh dari kota secara relatif tidak ada (Soekanto, 2006: h.136).

Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata latin *socius*, yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata arab yaitu *syaraka* yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah, saling berinteraksi. Lebih lengkapnya masyarakat adalah segolongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain (Koentjaraningrat, 2004: h.135).

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang berubah hidupnya karena proses masyarakat yang menyebabkan perubahan itu. Masyarakat mengenal kehidupan

yang tenang, teratur dan aman. Disebabkan karena pengorbanan sebagian kemerdekaan dari anggota-anggota, baik dengan paksa maupun suka rela. Pengorbanan di sini dimaksudkan menahan keinginan atau kehendak sewenang-wenang, untuk mengutamakan kepentingan dan kemauan bersama, dengan paksa berarti tunduk kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan negara dan sebagainya, dengan sukarela berarti menurut adaptasi dan berdasarkan kesadaran akan persaudaraan dalam kehidupan bersama (Soekanto, 2006: h.37).

Menurut Koentjaraningrat (2004: h.136) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

2.4 Pengertian Pembangunan

Todoro (2000: h.20) mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Lebih lanjut Todoro (2000: h.21) memberikan implikasi bahwa:

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan *income*, tetapi juga pemerataan.
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan seperti peningkatan.
 - a. *Life sistenance* (kemampuan hidup) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

- b. *Life Esteem* (Penghargaan hidup) kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer yaitu:

1. *Capacity* (kapasitas), hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan *income* atau produktifitas.
2. *Equity* (hak kekayaan), hal ini menyangkut aspek pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
3. *Empowerment* (Pemberdayaan), hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
4. *Sustainable*, (kelestarian) hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Menurut Rostow dalam Arief (2006: h.29) menyatakan bahwa :

Pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis *output* dari yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci di antara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong satu sektor atau lebih.

Menurut Tjokroamidjojo (2001: h.91) secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai proses perubahan dari kondisi nasional yang satu ke kondisi

nasional yang dipandang lebih baik atau kemajuan yang terus menerus menuju perbaikan kehidupan manusia yang mapan.

Siagian (2004: h.95) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Berdasarkan konsep pembangunan yang dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah sebagai suatu proses yang dilakukan secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk mengubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, menyangkut semua aspek kehidupan, fisik-nonfisik, material-spiritual, meliputi bidang: ideologi, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya dan ketahanan masyarakat atau nasional suatu bangsa.

2.5 Tujuan Pembangunan

Menurut Gant dalam Suryono (2001: h.31) tujuan pembangunan ada dua tahap, yaitu:

1. Tahap (1) pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya.
2. Menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah ketertiban masyarakat di dalam pembangunan.

Menurut Zulkarimen Nasution (2008: h.28-29) pembangunan memiliki dua tujuan yaitu:

1. Tujuan umum

Adalah proyeksi terjauh dari harapan-harapan dengan ide-ide manusia, komponen dari yang terbaik yang mungkin, atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus jangka pendek, biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu. Tujuan yang dirumuskan secara konkrit, dipertimbangkan rasional dan dapat direalisasikan sebatas teknologi dan sumber-sumber yang tersedia, yang ditegaskan sebagai aspirasi antara suatu situasi yang ada dengan tujuan akhir pembangunan.

2.6 Pengertian Gampong

Gampong Merupakan kesatuan hunian'asli' Aceh yang dikenal sejak sebelum Aceh menjadi wilayah kesultanan (Abad ke I6). Gampong adalah kesatuan wilayah hukum terendah yang asli lahir dari masyarakat, bahkan sebelumnya mukim yang merupakan kumpulan beberapa gampong, yang muncul setelah masa kesultanan di abad ke 16 dan 17.

Menurut T. Syamsuddin (dalam Jakfar Puteh, 2012: h.177) menjelaskan bahwa gampong adalah daerah hukum kecil di Aceh, seperti desa di Jawa, dusun di Sumatera Selatan, Huta di Tapanuli dan Nagari di Minang Kabau dan Kampung di Wilayah Melayu.

Badruzzaman Ismail, Dkk (Dalam Jakfar Puteh, 2012: h.177) mengatakan bahwa “Gampong adalah daerah yang memiliki rakyat dengan susunan pemerintahan sendiri. Dia juga menambahkan bahwa suatu gampong juga memiliki tatanan aturan, harta kekayaan dan batas territorial. Gampong berwenang penuh untuk mengembangkan adat dan istiadatnya, bahkan berfungsi menyelenggarakan peradilan adat sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki.

Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 pasal 2 dan 3 tentang pemerintahan gampong, menyebutkan bahwa gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah mukim dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari’at Islam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 20 tentang pemerintahan Aceh, menjelaskan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Menurut T. M. Juned (2003: h.35) menyatakan bahwa “Gampong dapat berarti sebagai tempat hunian penduduk atau persekutuan masyarakat hukum adat dan dapat pula berarti sebagai suatu kesatuan unit pemerintahan di negara kita”. Setiap gampong mempunyai sekurang-kurangnya sebuah meunasah (Mushalla), bahkan sekarang ini telah lebih dari satu meunasah (Mushalla).

Selanjutnya T. Djuned (2003: h.11) mengemukakan bahwa “Gampong dalam arti fisik merupakan sebuah kesatuan wilayah yang meliputi tempat hunian,

blang, padang dan hutan. Dalam arti hukum gampong merupakan persekutuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial.

Rusdi Sufi, dkk (2002: h.33-39) berpendapat bahwa :

Gampong terbentuk pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yakni bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh. Pada masa itu, sebuah gampong terdiri dari kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu sama lain. Pimpinan gampong disebut *keuchik*, yang dibantu seseorang yang mahir dalam masalah keagamaan dengan sebutan teungku *meunasah*. Gampong merupakan pemerintahan bawahan dari mukim.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gampong adalah gabungan dari jurong atau dusun dan merupakan kesatuan hukum yang bercorak agama serta pimpinan gampong disebut dengan keuchik gampong. Dalam struktur pemerintahan kesultanan Aceh dikala itu, kedudukan gampong merupakan suatu unit pemerintahan tingkat kelima setelah imeum mukim pada tingkat keempat, ulee balang pada tingkat ke tiga, pemerintahan *Sagoe* pada tingkat kedua dan kerajaan (raja) pada tingkat pertama.

2.7 Partisipasi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG)

Partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan proses perencanaan pembangunan dan mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggung jawab. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku.

Perencanaan dan partisipasi yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku. Dalam hal ini aktivitas lokal merupakan media dan sarana bagi masyarakat dalam melaksanakan partisipasinya.

Suryono (2001: h.32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan partisipasi masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika partisipasi masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan yaitu:

1. Pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan.
2. Pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam Proses perencanaan pembangunan harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan pembangunan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan masyarakat,
- 2) Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosial.
- 3) Program harus memperhatikan kepentingan kelompok dalam masyarakat.
- 4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

- 5) Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada.
- 6) Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang, member kemudahan untuk evaluasi.
- 7) Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga (KUWAT) yang tersedia.

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek dalam pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu juga resiko akan ditanggung pula oleh masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan adalah sangat dominan. Dalam pencapaian tujuan, dengan jalan mendiskusikan, merencanakan dan mengerjakan secara bersama-sama apa yang telah ditetapkan berbasis partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh masyarakat gampong, bukan oleh pemerintah. Melalui proses ini maka keinginan-keinginan dan kebutuhan masyarakat gampong dapat disalurkan .

Perencanaan pembangunan gampong adalah suatu yang sangat penting, dan dari perencanaan inilah arah pembangunan gampong dapat ditentukan. Kerena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah gampong untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan gampong. Aspirasi masyarakat dapat ditampung dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan tersebut, karena pada dasarnya masyarakatlah yang

berhak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan gampong dan pelaksanaan pembangunan gampong.

Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong menyatakan bahwa untuk menata pemerintahan gampong yang salah satunya bertujuan untuk pembangunan masyarakat gampong. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, menata masyarakat dengan prinsip-prinsip demokrasi, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Berdasarkan qanun tersebut, bahwa pemerintahan gampong berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten. Gampong diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di gampong, maka gampong diharuskan mempunyai rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG) atau rencana pembangunan tahunan gampong (RKP gampong).

Rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG) adalah rangkaian rencana dalam kegiatan mendasar yang dibuat pemerintah gampong untuk dilaksanakan oleh seluruh jajaran gampong dan unsur-unsur gampong. RPJMG adalah dokumen yang sangat penting bagi pembangunan gampong, yang memuat arah kebijakan keuangan gampong dan strategi pembangunan gampong dan program kerja gampong serta menggambarkan cita-cita atau harapan dari

gampong dan bagaimana mengelola dan memberdayakan dalam mencapai cita-cita tersebut dalam jangka waktu lima tahun.

Perencanaan pembangunan gampong merupakan perencanaan pembangunan yang dilakukan masyarakat, dari dan untuk masyarakat, dengan pengarahannya, bimbingan dan pembinaan serta pengawasan dilakukan oleh pemerintah. Proses pembangunan yang seperti ini apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat gampong dapat terpenuhi dan diwujudkan dalam bentuk nyata berlandaskan musyawarah.

Dengan pelaksanaan pembangunan hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002: h.3) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tentang bagaimana partisipasi masyarakat terhadap rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG) di Gampong Gunong Kleng.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Adapun Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Menurut Moh. Nazir (2005: h.51) “Sumber data adalah sumber-sumber dasar yang merupakan bukti saksi utama dari kejadian yang lalu, contohnya ialah catatan resmi yang dibuat pada suatu acara atau upacara, suatu keterangan oleh saksi mata, keputusan-keputusan rapat, foto-foto, dan sebagainya”.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian langsung di lapangan yang bersumber pada penelitian wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan keuchik

gampong, masyarakat, dan beberapa orang aparatur gampong. Adapun observasi dilakukan di lapangan terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

2. Data Sekunder

Menurut Hasan (2002: h.82) data sekunder adalah “data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. data sekunder merupakan data yang didapat dari studi kepustakaan, dokumen, koran, internet yang berkaitan dengan kajian penelitian yang diteliti oleh penulis”. Untuk melengkapi data penelitian, maka data sekunder juga diperoleh dari dokumen RPJMG gampong, seperti data jumlah penduduk, luas wilayah, dan fasilitas ekonomi dan sosial.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedang observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki (Rachman, 1999: h.77).

Dalam kegiatan pengumpulan data metode observasi merupakan salah satu metode utama di samping metode wawancara. Dalam hal ini pengamatan yang dilakukan melalui dua cara:

1. Pengamat berperan serta adalah dimana pengamat melakukan dua peran sekaligus sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati.
2. Pengamat tanpa berperan serta yaitu pengamat hanya berfungsi untuk mengadakan pengamatan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu di Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Pengamatan dilakukan sendiri secara langsung di tempat yang menjadi objek penelitian, sedangkan objek yang diamati adalah aktifitas masyarakat terhadap keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan jangka menengah gampong.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2002: h.135) “Wawancara adalah percakapan yang terjadi antara pewawancara dengan yang diwawancarai berdasarkan maksud tertentu”. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam kepustakaan, diantaranya dikemukakan oleh Patton (dalam Moleong, 2002: h.197) dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua model wawancara yaitu:

- a. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu jenis wawancara yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dinyatakan dalam proses wawancara.
 - 2) Penyusun pokok-pokok itu dilakukan sebelum wawancara dilakukan.
 - 3) Pokok-pokok yang yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan.
 - 4) Penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya.
 - 5) Petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya.
- b. Wawancara baku terbuka, yaitu jenis wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya sama untuk setiap responden.

Wawancara akan dilakukan dengan keuchik, Kadus, Sekdes dan masyarakat, karena mereka sumber utama dalam mencari informasi mengenai rencana pembangunan jangka menengah gampong.

3. Dokumentasi

Tehnik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. (Rachman, 1999: h.96).

Pada dasarnya proses studi dokumentasi bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, akan tetapi seringkali bersamaan dengan penggunaan tehnik

pengumpulan data yang lainnya. Dimana mempelajari dokumentasi pasti diawali dengan wawancara terutama yang menyangkut pembicaraan yang ada kaitannya dengan dokumen yang akan dipelajari.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan hanya sebagai pelengkap dari tehnik pengumpul data lainnya. Data-data yang diambil dari dokumen hanya meliputi gambaran umum wilayah penelitian, yang diperoleh dari data monografi Gampong Gunong Kleng, yang meliputi: luas wilayah, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, sarana perekonomian, dan tingkat pendidikan serta sarana umum.

3.3 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung dalam empat tahapan, yaitu:

1. Persiapan penelitian, mempelajari dan melihat permasalahan yang ada untuk dijadikan sebagai objek penelitian.
2. Pengumpulan data sekunder melalui studi perpustakaan. Kemudian proposal penelitiannya diseminarkan.
3. Penelitiann lapangan, proses pengolahan data. Ke empat, penulisan laporan dan seminar hasil.

Secara rinci, jadwal penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel : 3.1
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan/Tahun 2012							
		4	5	6	7	8	9	10	11
I	Persiapan Penelitian	√							
II	Pengumpulan Data Sekunder		√						
	Pembuatan Proposal			√	√				
	Seminar Proposal				√				

III	Penelitian Lapangan					√			
	Pengolahan Data					√	√		
	Analisis Data					√	√		
IV	Penulisan Laporan							√	
	Seminar Hasil							√	
	Sidang Konprehensif								√

3.4 Instrumen Penelitian

Moleong (2002: h.4) mendefinisikan bahwa metode kualitatif, adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, maka peneliti adalah sebagai instrumen kunci peneliti merupakan instrumen kunci utama, karena peneliti sendirilah yang menentukan keseluruhan skenario penelitian serta langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan.

Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian untuk mendapatkan data yang *valid* dan *realible*. Namun, untuk membantu kelancaran dalam melaksanakannya, penelitian ini juga didukung oleh instrumen pembantu sebagai paduan wawancara. oleh karena itu sebelum turun ke lapangan, maka peneliti akan membuat panduan wawancara untuk memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan. Alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu : dokumen, laporan dan lain sebagainya.

3.5 Teknik Analisa Data

Menurut Moleong (2002: h.103) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana pembahasan

penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, maka analisis data yang digunakan non statistik.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah-langkah atau alur yang terjadi bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau alur verifikasi data (Miles, 2007: h.15-19). Berikut ini langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 2007: h.17).

Reduksi data ini bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan yang dapat ditarik atau verifikasi. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

2. Penyajian data

Miles dan Huberman (2007: h.18) mengatakan bahwa penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan . Dalam hal ini, data yang telah

dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang teliti.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna - makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya. Penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti. (Miles dan Huberman, 2007: h.19).

3.6 Pengujian Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan *member check*. Pengujian kredibilitas data digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai subyek penelitian (Sugiyono, 2007: h.270).

Adapun pengujian kredibilitas data adalah sebagai berikut :

1. Perpanjangan pengamatan

Menurut Moleong (2002: h.327) perpanjangan pengamatan perlu dilakukan karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dirasakan data yang diperoleh masih kurang memadai. perpanjangan pengamatan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dalam pengumpulan data, pengamatan yang dilakukan tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat melainkan memerlukan perpanjangan pengamatan

dengan keikutsertaan pada data penelitian. Perpanjangan pengamatan yang dilakukan peneliti adalah dengan sering melakukan hubungan interaksi dengan masyarakat dan aparat gampong serta sering melakukan pengamatan di lapangan.

2. Peningkatan ketekunan

Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih mendalam untuk memperoleh kepastian data. Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan membaca berbagai referensi baik buku maupun dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti sehingga berguna untuk memeriksa data apakah benar dan bisa dipercaya atau tidak.

3. Triangulasi

Sugiyono (2007: h.225) mengungkapkan analisa triangulasi merupakan suatu metode analisis untuk mengatasi masalah akibat dari kajian mengandalkan satu teori saja, satu macam data atau satu metode penelitian saja. Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara.

Menurut Sugiyono (2007: h.273) terdapat minimal tiga macam triangulasi, yaitu:

a. Triangulasi sumber data

Pada triangulasi sumber data, data dicek kredibilitasnya dari berbagai sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama misalnya, mengecek sumber data antara bawahan, atasan dan teman.

b. Triangulasi teknik pengumpulan data

Pada triangulasi teknik pengumpulan data, data di cek kredibilitasnya dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda dengan sumber data yang sama.

c. Triangulasi waktu pengumpulan data

Pada triangulasi waktu pengumpulan data, data dicek kredibilitasnya dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan teknik yang sama. Triangulasi menjadikan data yang diperoleh dalam penelitian menjadi lebih konsisten, tuntas dan pasti serta meningkatkan kekuatan data (Sugiyono, 2007: h.241).

4. Pemeriksaan teman sejawat

Pemeriksaan teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan data hasil temuan dengan rekan-rekan sesama mahasiswa maupun teman yang bukan mahasiswa. Melalui diskusi ini diharapkan akan ada saran atau masukan yang berguna untuk proses penelitian.

5. Analisis kasus negatif

Menurut Sugiyono (2007: h.275) melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

6. Member Check

Member check atau pengujian anggota dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian kepada sumber-sumber yang telah memberikan data untuk mengecek kebenaran data dan interpretasinya.

Menurut Moleong (2002: h. 336) pengecekan dilakukan dengan cara:

- a) Penilaian dilakukan oleh responden.
- b) Mengkoreksi kekeliruan.
- c) Menyediakan tambahan informasi secara sukarela.
- d) Memasukan responden dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data.
- e) Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

3.7 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (key-informam) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informasi kunci tersebut maka penulis menggunakan “*purposive sampling*” atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2009: h.128).

Untuk pengecekan tentang kebenaran hasil wawancara yang didapat dari informan, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keuchik	1 orang
2. Kaur Pembangunan	1 orang
3. Sekdes	1 orang
4. Kadus	4 orang
5. Tuha Peut	1 Orang
6. Masyarakat	12 orang
Jumlah	20 orang

Jadi, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang. Penentuan informan berdasarkan maksud dan tujuan penulis. Tujuan diambil mereka sebagai informan, karena mereka terlibat dalam merumuskan dan melakukan pengawasan terhadap rencana pembangunan jangka menengah gampong di Gampong Gunong Kleng.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka menengah gampong masih terdapat hambatan-hambatan di dalamnya. Kemudian untuk mengetahui gambaran umum lokasi penelitian, maka yang perlu diketahui adalah kondisi geografi, demografi dan sosial ekonomi.

4.1.1.1 Kondisi Geografis

1. Letak Gampong

Gampong Gunong Kleng adalah salah satu gampong yang berada di Kemukiman Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan luas \pm 1216 ha, terletak 7 Km dari ibu kota kabupaten Aceh Barat yaitu Meulaboh. Gampong Gunong Kleng terbagi atas empat Dusun/Jurong yaitu:

1. Dusun Pondok Geulumbang
2. Dusun Pasi
3. Dusun Lueng Cadek
4. Dusun Kedee Simpang

Ditinjau dari segi geografis Gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat merupakan gampong yang berdekatan dengan

Gampong Peunaga Cut Ujong, Gampong Peunaga Rayek, dan Gampong Peunaga Pasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 4.1
Jarak Gampong Dengan Pemerintahan dan Sarana Vital

1	Ibu kota Provinsi	309 Km	Banda Aceh
2	Ibu kota kabupaten	7 Km	Meulaboh
3	Ibu kota kecamatan	4 Km	Meureubo
4	Pasar	4 Km	Meulabho
5	Rumah Terminal	7 Km	Meulaboh
6	Ke kantor Polisi	3 Km	Polsek Meureubo
7	Jarak Ke Laut	0,5 Km	

Sumber: Monografi Gampong Gunong Kleng tahun 2012

2. Batas Gampong

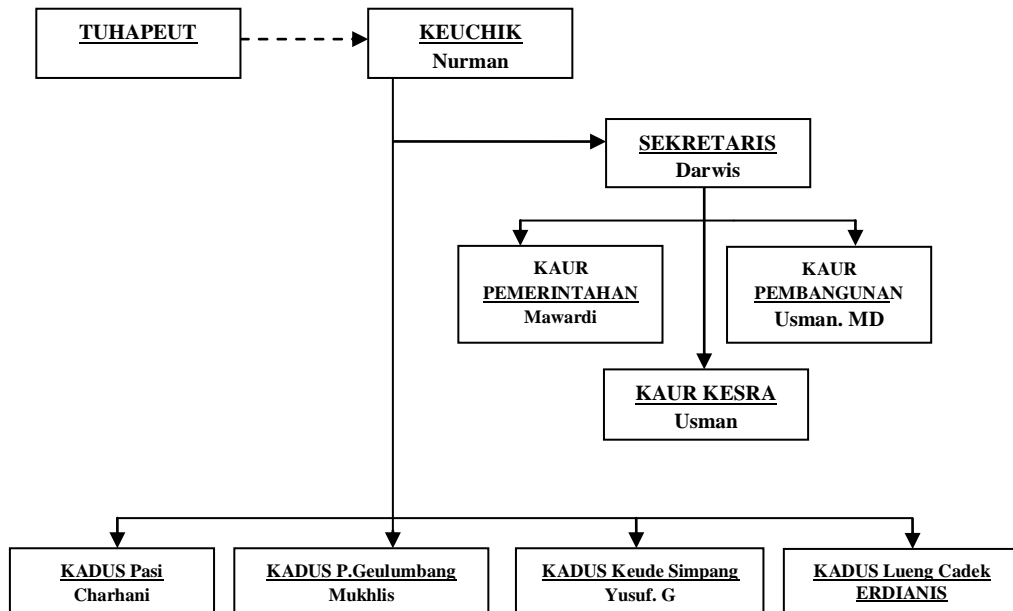
Gampong Gunong Kleng merupakan salah satu desa di Kecamatan Meureubo yang berbatasan dengan beberapa gampong lain yang masih dalam satu kecamatan. Adapun batas gampong adalah:

- Sebelah Utara : Gampong Bukit Jaya
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia dan Gampong Peunaga Pasi
- Sebelah Barat : Gampong Peunaga Rayek
- Sebelah Timur : Gampong Peunaga Cut Ujong

3. Pembagian Wilayah

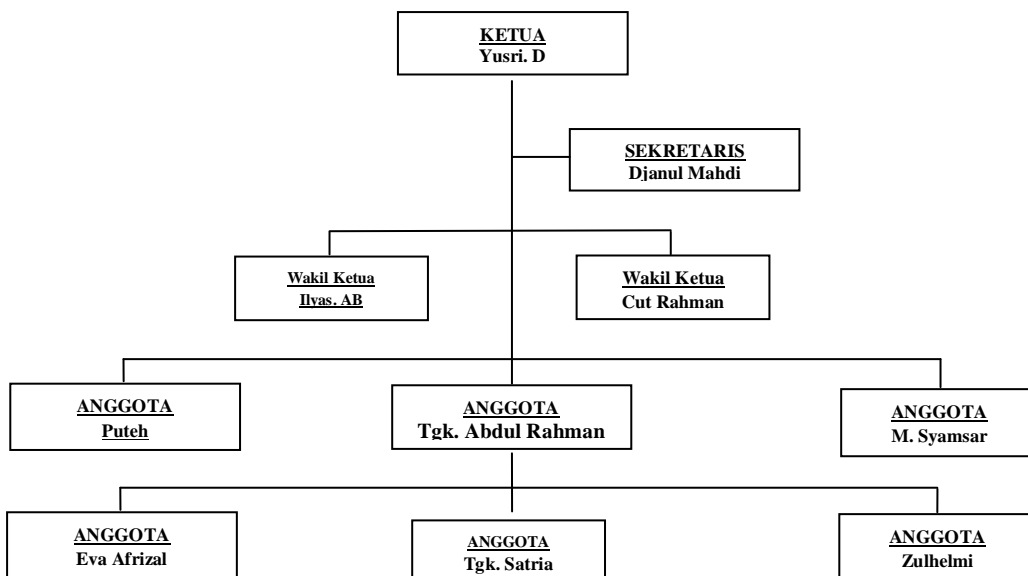
Gampong Gunong Kleng dipimpin oleh seorang keuchik yang bernama Norman. Dalam menjalankan pemerintahan, keuchik dibantu oleh perangkat gampong lainnya yaitu seorang sekretaris gampong dan 5 orang perangkat desa lainnya. Untuk mengetahui struktur pemerintahan gampong maka dapat dilihat pada struktur di bawah ini :

**Struktur Organisasi Pemerintahan
Gampong Gunung Kleng Kecamatan Meureubo
Kabupaten Aceh Barat
Periode 2007 – 2012**



Sumber: Monografi Gampong Gunung Kleng tahun 2012

**Struktur Organisasi Tuha Peut
Gampong Gunung Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat
Periode 2007 – 2012**



Sumber: Monografi Gampong Gunung Kleng tahun 2012

4.1.1.2 Kondisi Demografis

1. Penduduk

Jumlah penduduk Gampong Gunong Kleng berdasarkan data dinamis akhir tahun 2012 secara keseluruhan adalah 1520 jiwa, dengan perincian 788 jiwa penduduk laki-laki dan 719 jiwa penduduk perempuan. Sementara jumlah penduduk Gampong Gunong Kleng berdasarkan kelompok umur dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel : 4.2
Klasifikasi Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1	0 –12 Bulan	29	15	44
2	13 – 04 Tahun	58	38	92
3	05 – 06 Tahun	32	32	64
4	07 – 12 Tahun	108	86	194
5	13 – 15 Tahun	44	42	86
6	16 – 18 Tahun	35	47	82
7	19 – 55 Tahun	104	90	194
8	26 – 35 Tahun	118	139	257
9	36 – 45 Tahun	123	105	228
10	46 – 50 Tahun	37	39	76
11	51 – 60 Tahun	44	42	86
12	61 – 75 Tahun	36	38	74
13	Di atas Tahun	24	21	45
TOTAL		788	719	1520

Sumber : Data Monografi Gampong Gunong Kleng Tahun 2012

Berdasarkan data tabel 4.2 di atas, maka dapat lihat bahwa jumlah penduduk Gampong Gunong Kleng paling banyak berdasarkan umur adalah umur 26 – 35 Tahun dengan jumlah 257 dan yang paling sedikit adalah umur 0 –12 Bulan, yaitu 44 orang.

4.1.1.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Mengetahui keadaan sosial ekonomi suatu wilayah sangat penting, agar kita mengetahui berbagai potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Selain itu bagi pihak pemerintah dengan sendirinya dapat dijadikan dasar guna menyusun kebijaksanaan pemerintah setempat. Masing-masing aspek sosial dan ekonomi suatu daerah pada hakikatnya menunjukkan tingkat keberhasilan dan kemajuan daerahnya di dalam melaksanakan pembangunan. Adapun keadaan sosial dan ekonomi di wilayah Gampong Gunong Kleng dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bidang ekonomi

Untuk mengetahui aktivitas yang dijalani sehari-hari oleh suatu wilayah dalam bidang ekonomi umumnya dapat ditunjukkan melalui mata pencaharian penduduknya. Disamping itu dengan melihat mata pencaharian penduduk tersebut kita dapat mengetahui pula tingkat tinggi rendahnya taraf hidup masyarakat. Untuk lebih jelasnya dibawah ini disajikan tabel mengenai penduduk Gampong Gunong Kleng menurut mata pencaharian:

Tabel: 4.3
Mata Pencaharian Penduduk Gampong Gunong Kleng

No	Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah
1	Petani	125
2	Pedagang	38
3	Peternak	267
4	Nelayan	4
5	Industri Rumah Rumah Tangga	12
6	Bengkel	9
7	Sopir	15
8	PNS/TNI dan Polri	28
9	Tidak bekerja/ belum bekerja	1022
Jumlah		1520

Sumber : Data Monografi Gampong Gunong Kleng Tahun 2012

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, maka dapat dilihat jumlah penduduk Gampong Gunong Kleng paling banyak berdasarkan mata pencaharian adalah penduduk yang tidak bekerja/belum bekerja dengan jumlah 1022 orang. Kemudian yang paling sedikit adalah penduduk yang mata pencahariannya nelayan dengan jumlah 4 orang.

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah wajib bagi setiap manusia. Melalui pendidikan akan merubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu merubah nilai-nilai yang tidak baik menuju kearah yang lebih baik. Berikut adalah data mengenai tingkat pendidikan warga Gampong Gunong Kleng:

Tabel: 4.4
Jumlah Penduduk Gampong Gunong Kleng Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S1	19
2	SMA	170
3	SMP	213
4	SD	317
5	D III	8
6	D II	2
7	Tidak sekolah/belum sekolah	791
	Jumlah	1520

Sumber : Data Monografi Gampong Gunong Kleng Tahun 2012

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Gampong Gunong Kleng paling banyak adalah yang tidak sekolah/belum sekolah dengan jumlah 791 orang dan paling sedikit adalah pendidikan DII dengan jumlah 2 orang.

3. Fasilitas Sosial dan ekonomi

Fasilitas sosial dan ekonomi sangat diperlukan oleh masyarakat, maka oleh sebab itu pemerintah membangunnya, agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel: 4.5

Fasilitas Sosial dan Eknomi Gampong Gunong Kleng

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Penggunaan Fasilitas
1	Fasilitas Agama	1 Unit	Tempat beribadah dan pusat kegiatan keagamaan
	Mesjid	1 Unit	
	Mushalla	3 Unit	
	Bak Udhuk	1 Unit	
	Pesantren	1 Unit	
2	Fasilitas Pendidikan		Tempat berlangsungnya Belajar Mengajar
	SD	3 Unit	
	TK TPA	1 Unit	
3	Fasilitas Ekonomi Lembaga keuangan Mikro	1 Unit	Pusat Perdagangan
4	Fasilitas Pemerintahan Kantor Desa	1 Unit	Untuk pelayanan masyarakat dan tempat pertemuan masyarakat.
5	Fasilitas olah raga		Kegiatan pemuda dan oleh raga
	Lapangan bola kaki	1 Unit	
	Lapangan Bola Voly	2 Unit	

Sumber : Data Monografi Gampong Gunong Kleng Tahun 2012

4.1.2 Partisipasi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) di Gampong Gunung Kleng

4.1.2.1 Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah dan perencanaan, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, khususnya rencana pembangunan jangka menengah gampong dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.

Rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG) merupakan rencana pembangunan gampong yang akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan gampong dalam jangka waktu 5 (lima) tahun hingga tercapainya tujuan dan cita-cita gampong secara tepat dan sesuai dengan tahapan dalam penyusunan aspirasi, keadaan dan kebutuhan masyarakat dalam menentukan tindakan masa depan gampong secara tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam perumusan Rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG) diperlukan dukungan sebuah tim yang memiliki kemampuan, pemahaman dan pengetahuan untuk merencanakan pembangunan gampong ke arah yang lebih baik. Pembentukan Tim Perencana Gampong ini adalah salah satu Rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG) dan langkah awal yang harus dilakukan adalah pemilihan Tim perencana gampong, proses

pemilihan dilakukan melalui proses kesepakatan bersama antara pemerintah gampong, Tuha Peut, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan masyarakat Gampong Gunong Kleng.

Hal ini sesuai dengan Hasil wawancara dengan Bapak Norman selaku Keuchik menyatakan bahwa:

Masyarakat yang ikut serta dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah gampong, hanya orang yang dipilih seperti cerdik padai atau anggota *Tuha Peut* dan dari unsur aparat gampong, kemudian ada orang-orang yang mengerti masalah perumusan rencana pembangunan jangka menengah. (wawancara, 19 Juli 2012).

Hasil wawancara dengan Usman.MD selaku Kaur pembangunan menyatakan bahwa:

Masalah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Gampong Gunong Kleng, tahap pertama yang perlu dilaksanakan adalah perencanaan dan perumusan rencana tersebut yang kemudian dimusyawarahkan bersama masyarakat, jadi orang yang ikut serta dalam musyawarah tersebut hanya orang yang dipilih dan diundang oleh aparat Gampong. Ada juga sebagian masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah tersebut tapi hanya orang-orang tertentu. (wawancara, 19 Juli 2012).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Syafruddin selaku masyarakat Gampong Gunong Kleng menyatakan bahwa:

Kalau saya tidak ikut masalah musyawarah rencana pembangunan jangka menengah Gampong, yang ikut hanya orang tertentu saja, kan warga Gampong Gunong Kleng banyak, jadi hanya sebagian saja yang ikut berpartisipasi, misalnya aparat gampong atau orang-orang yang mengerti masalah pembangunan gampong (wawancara, 20 Juli 2012).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat terhadap penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Gampong Gunong Kleng merupakan partisipasi masyarakat yang ikut serta hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian tidak semua masyarakat ikut serta dalam merumuskan rencana pembangunan jangka menengah gampong tersebut.

Dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah gampong yang seharusnya melibatkan seluruh warga masyarakat, sering terjadi hal yang sebaliknya, yaitu timbulnya rasa enggan dari warga karena mereka merasa bahwa kegiatan itu hanya akan memberikan manfaat bagi kelompok tertentu. Hasilnya adalah prasarana lingkungan yang telah selesai dibangun.

Dalam mewujudkan alternatif keberadaan RPJMG, maka pentingnya partisipasi masyarakat sebagai obyek pembangunan. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat sudah sepenuhnya dianggap sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Karena selama ini keterlibatan masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya masyarakat cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan sosial. Sehingga peran serta masyarakat "terbatas" pada implementasi atau penerapan program, masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil pihak luar.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Eva Afrizal selaku PNS Gampong Gunong Kleng menyatakan bahwa:

Kalau menurut saya keterlibatan masyarakat atau keikutsertaan masyarakat terhadap perumusan rencana pembangunan gampong itu sangat perlu, karena apa saja kegiatan di dalam gampong pasti yang pertama dilibatkan adalah masyarakat itu sendiri, sebab dengan partisipasi masyarakat pembangunan gampong pasti akan terwujud. (wawancara, 22 Juli 2012).

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Darwis selaku Sekretaris Gampong menyatakan bahwa:

Dalam merumuskan rencana pembangunan gampong baik pada tahap rencana dan musyawarah pelaksanaan kegiatan tersebut, tentu melibatkan masyarakat, walaupun tidak semua masyarakat dilibatkan hanya saja dari beberapa orang saja yang diajak, yang mengerti dan benar-benar mau membantu terlaksananya dalam pembangunan gampong. (wawancara, 22 Juli 2012).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan mutlak diperlukan, karena dengan melibatkan masyarakat penyusunan rencana pembangunan jangka menengah gampong akan berhasil.

4.1.2.2 Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pelaksanaan

Rencana pembangunan jangka menengah gampong tentu dilalui dengan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam Perencanaan pembangunan tentu masyarakat akan dilibatkan. Maka dari itu rencana pembangunan gampong sudah tentu adanya pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Norman selaku keuchik gampong, mengatakan bahwa: “Rencana pembangunan jangka menengah gampong, bahwa

warga masyarakat beranggapan bahwa, siapapun boleh terlibat, apalagi prasarana yang dibangun berada di lingkungan permukiman warga. Peran serta masyarakat yang terjadi saat pelaksanaan pembangunan yang terjadi saat pelaksanaan pembangunan yaitu pemanfaatan dana ADG”(wawancara, 23 Juli 2012).

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Usman. KL selaku Kaur Kesra menyatakan bahwa :

Pada tahap rencana pembangunan gampong, masyarakat diikutsertakan, seperti pelaksanaan pembangunan sarana fisik dan sarana sosial, seperti pembangunan jalan setapak, Musalla, Mesjid dan sebagainya dengan memanfaatkan dana ADG”. (wawancara, 23 Juli 2012).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat atau keikutsertaan pelaksanaan pembangunan gampong sangat diperlukan karena dengan melibatkan masyarakat, pembangunan tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya. Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu bapak Riswandi yang ikut serta dalam merumuskan rencana pembangunan gampong, yaitu :

Kami merasa lebih diperhatikan dan dihargai partisipasi kami, jadi saya merasa senang sekali. Kalau partisipasi kami ini bisa dimanfaatkan untuk merumuskan rencana pembangunan gampong Gunong Kleng, walaupun partisipasi kami ini dalam bentuk pemberian pendapat atau memberikan saran dan masukan demi lancarnya rencana pembangunan gampong. (wawancara, 23 Juli 2012).

Hal senada juga disampaikan oleh Carhani selaku masyarakat, yaitu sebagai berikut :

Kita merasa bebas untuk menentukan rencana pembangunan gampong, karena usulan-usulan yang telah dirumuskan di tingkat

dusun/gampong bisa masuk menjadi agenda rencana pembangunan Gampong Gunong Kleng. Harapan kami selanjutnya adalah bahwa program rencana pembangunan gampong yang dirumuskan tersebut bisa disetujui dan dianggarkan oleh pemerintah sehingga rencana pembangunan jangka menengah gampong bisa terwujud (wawancara, 23 Juli 2012).

Dari pernyataan tersebut, bahwa sebenarnya untuk sebagian besar masyarakat mengharap dilibatkan di dalam merumuskan rencana pembangunan. Oleh karena itu perlunya sosialisasi terhadap rencana pembangunan jangka menengah gampong Gunong Kleng. Keuchik Gampong Gunong Kleng berusaha untuk dapat melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses merumuskan rencana jangka menengah gampong.

Berikut adalah hasil wawancara dengan keuchik Gampong Gunong Kleng menyatakan bahwa :

Saya usahakan untuk proses perumusan rencana pembangunan jangka menengah gampong kali ini sebisa mungkin dapat melibatkan masyarakat secara keseluruhan, namun karena kesibukan dan keterbatasan ruang maka tidak seluruhnya saya undang, kan aspirasi mereka sudah ditampung dalam list daftar prioritas kegiatan pembangunan gampong, saya yakin mereka memaklumi (wawancara, 21 Juli 2012).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh M.Yusuf. G selaku Kadus Keude Simpang menyatakan bahwa:

“Kami seluruh aparat gampong akan berusaha untuk melibatkan masyarakat gampong Gunong Kleng untuk melaksanakan rencana pembangunan gampong. Berbagai macam cara kami untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan gampong” (wawancara, 21 Juli 2012).

Hasil wawancara dengan Usman MD selaku kaur pembangunan menyatakan bahwa:

Memang aparat gampong selama ini berusaha penuh untuk mengajak kami untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan gampong. Salah satu cara aparat gampong mengajak kami dalam berpartisipasi pada tahap pelaksanaan pembangunan gampong adalah dengan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat dengan musyawarah (wawancara, 21 Juli 2012).

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat terhadap rencana pembangunan jangka gampong sangat diperlukan. Pihak aparat gampong tetap berusaha untuk berupaya mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan gampong.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu sekaligus sebagai indikator keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan gampong. Seberapa kerasnya usaha pemerintah membangun, jika tidak melibatkan masyarakat, maka tingkat keberhasilan pembangunan dan keberlanjutan pembangunan jangka menengah gampong akan berbeda dengan kondisi jika masyarakat berpartisipasi.

dengan demikian bahwa untuk mencapai suatu program pembangunan gampong yang tidak bisa mengabaikan keikutsertaan masyarakat, di mana masyarakat harus ditempatkan pada kedudukan yang semestinya, artinya masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategis kebijakan dan keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

4.1.2.2 Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pengawasan

Perumusan rencana pembangunan jangka menengah gampong merupakan pembangunan yang sangat perlu dalam partisipasi masyarakat. partisipasi tersebut tidak hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, akan tetapi lebih penting adalah partisipasi masyarakat terhadap pengawasan proses pembangunan gampong tidak dibutuhkan pihak luar, akan tetapi sangat dibutuhkan masyarakat di lingkungan itu sendiri.

Dalam perumusan rencana pembangunan, maka tingkat partisipasi masyarakat perlu di tingkatkan. Pengawasan masyarakat disetiap kegiatan pembangunan sangat diperlukan. Masyarakat meminta dengan mudah tingkat kekuasaan (atau pengawasan) yang menjamin partisipan dan penduduk dapat menjalankan sebuah program atau suatu lembaga akan berkuasa penuh baik dalam aspek kebijakan maupun untuk menegosiasikan kondisi pada saat dimana pihak luar bisa menggantikan mereka. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan pak keuchik mengatakan bahwa:

Masyarakat perlu juga ikut mengawasi jalannya proses pembangunan, walaupun tidak semua dilibatkan, hanya orang-orang tertentu saja, seperti warga yang memiliki jabatan di dalam pemerintahan gampong, karena pengawasan tersebut tidak dilibatkan pihak pemerintah kecamatan akan tetapi warga masyarakat gamponglah yang seharusnya mengawasi (wawancara, 21 Juli 2012).

Hasil wawancara dengan bapak safril menyatakan bahwa :

Kami ikut berpartisipasi terhadap pengawasan rencana pembangunan dengan alasan karena hasil pembangunan tersebut milik bersama, sehingga manfaatnya pin dirasakan semua warga. Buktinya sudah ada pembangunan yang dijalankan dan mendapat pengawasan, contohnya pembangunan jalan setapak, pembangunan irigasi dan pembangunan jembatan desa (wawancara, 21 Juli 2012).

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Suhardi selaku warga lainnya menyatakan bahwa:

“Saya ada ikut mengawasi, karena manfaatnya untuk kita, jadi apa salahnya kita melakukan pengawasan yang berguna bagi kita semua. Kemudian pengawasan itu merupakan bentuk partisipasi saya terhadap pembangunan jangka menengah gampong” (wawancara, 21 Juli 2012).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa pengawasan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat terhadap rencana pembangunan jangka menengah gampong, dengan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, maka hasil pembangunan yang nantinya bisa mendapatkan hasil yang baik. Dengan dilakukannya perencanaan serta pelaksanaan oleh masyarakat, diharapkan pengawasan akan dilakukan juga oleh masyarakat sehingga hasil yang diperoleh sesuai keinginan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan petikan wawancara dengan Bapak Erdianis selaku Kaur Lueng Cadek yaitu sebagai berikut:

“Pengawasan tersebut perlu dilaksanakan, karena dengan adanya pengawasan, maka hasil pembangunan jangka menengah gampong sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat pun tau bahwa pembangunan yang selama ini direncanakan mendapat hasil yang baik” (wawancara, 21 Juli 2012).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Abdul Rasyid selaku warga, yaitu sebagai berikut:

“Rencana Pembangunan jangka menengah gampong perlu diawasi dengan secara seksama, agar apa yang diharapkan masyarakat sesuai dengan keinginan

masyarakat, sebab tanpa pengawasan nanti ditakutkan hasilnya tidak dengan yang diharapkan". (wawancara, 21 Juli 2012).

Bedasarkan wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan sangat diperlukan, karena dengan adanya pengawasan tentunya hasil pembangunan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan suatu usaha untuk menggerakkan masyarakat agar mereka ikut terlibat baik secara mental maupun emosional untuk mencapai hasil yang diinginkan bersama. Demikian pula halnya dengan upaya pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman, apabila lingkungan permukiman dapat terpelihara dan senantiasa dalam kondisi baik/bermanfaat sesuai yang diinginkan, maka harus didukung oleh adanya partisipasi dari masyarakat baik dalam bentuk pemeliharaan maupun pengawasan. Kemudian di dalam melaksanakan kegiatan perumusan rencana pembangunan gampong, ada juga masyarakat yang tidak aktif mengawasi kegiatan pembangunan, karenan hal tersebut bukanlah tanggung jawab tugas masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Amran selaku masyarakat, yaitu sebagai berikut:

Saya tidak ikut mengawasi proses perumusan rencana pembangunan jangka menengah gampong sebab itu kan bukan tugas saya, tapi ada juga masyarakat lain yang ikut serta karena diberi tugas oleh pemerintah gampong atau pemerintah kecamatan, jadi masalah mengawasi kegiatan pembangunan ini saya kurang terlibat, karena saya sibuk dengan kegiatan saya (wawancara, 21 Juli 2012).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh jaka, yaitu sebagai berikut:

“Saya bukan tak ikut serta masalah pengawasan pembangunan tersebut, sebab tidak ditugaskan atau diberikan tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan pembangunan, kalau memang saya diberi tugas untuk mengawasi, baru saya ikut mengawasinya. (wawancara, 21 Juli 2012).

Hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat tidak ikut serta berpartisipasi karena tidak diberi tugas atau tanggung jawab sehingga ada sebagian masyarakat tidak ikut dalam berpartisipasi dalam merumuskan rencana pembangunan dan melakukan pengawasan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa partisipasi masyarakat terhadap perumusan rencana pembangunan jangka menengah di Gampong Gunong Kleng sangatlah rendah, hal itu terlihat bahwa sedikitnya masyarakat yang melakukan pengawasan karena mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan pengawasan sering tidak aktif. Kegiatan pengawasan rencana merumuskan rencana pembangunan gampong perlu dilakukan masyarakat gampong.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Partisipasi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) di Gampong Gunong Kleng

4.2.1.1 Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukan agar proses pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik. Apabila masyarakat tidak diikuti secara dini dalam proses perencanaan pembangunan, maka pembangunan akan sulit untuk dicapai.

Suatu rencana atau keputusan yang telah disampaikan oleh pemerintah dan masyarakat hanya mendapatkan kesempatan untuk menyatakan setuju (biasanya setelah “diarahkan” terlebih dahulu) tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Alasannya bahwa masyarakat belum tahu apa-apa, janganlah digunakan. Alasan bahwa pengikutsertaan masyarakat sejak awal sekali akan memperlambat proses pembangunan. (Miller dan Rein (dalam Ndraha, 2002: h.49)

Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Siagian (2000: h.21) yang menyatakan bahwa pembangunan untuk masyarakat akan terwujud dengan cara atau melalui dan bersama rakyat sendiri. Ide atau rencana dibawa dalam rapat dan rakyat diberitahu dan diajak untuk berdiskusi. Ndraha (2002: h.49) berpendapat bahwa partisipasi dalam perencanaan wujudnya bisa berupa kehadiran dalam rapat, pemikiran, dan waktu.

Perumusan rencana pembangunan jangka menengah Gampong Gunong Kleng telah direncanakan dengan musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat dan tokoh-tokoh gampong dengan memberikan pemikiran dan ide serta saran. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah gampong pada hakekatnya meliputi partisipasi dalam pemilihan alternatif tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan yang dapat berwujud usul, saran, tanggapan dan penentuan pilihan, yang kesemuanya dapat disampaikan dalam rapat (Musrembang Gampong).

Pada prinsipnya, keberhasilan pembangunan tergantung pada adanya keterlibatan aktif masyarakat, maka sebaliknya pembangunan dapat aktif dalam

partisipasi aktif masyarakat apabila benar-benar mencerminkan kepentingan atau aspirasi masyarakat. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam perencanaan diantaranya dalam hal ikut serta menghadiri rapat-rapat persiapan perencanaan program, memberikan tanggapan atau usul mengenai gagasan yang ada, ikut menyetujui dan merumuskan rencana yang ada.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat di lapangan bahwa diperoleh keterangan masyarakat Gampong sangat terlibat dalam pelaksanaan musyawarah gampong. Ketika musyawarah masyarakat tetap hadir, walaupun ada juga sebagian yang tidak hadir karena ada kesibukan lain.

4.2.1.2 Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat sebagai suatu unsur pelaksana harus bertanggung jawab dalam aktivitas pelaksanaan pembangunan dengan jalan mengarahkan dukungantenaga, keterampilan, dana dan fasilitas bagi proyek-proyek pembangunan yang telah ditetapkan dan menciptakan suasana kerja sama dalam pembangunan.

Partisipasi adalah keikutsertaan dalam proses pelaksanaan pembangunan.tahap ini dalam pembangunan adalah implementasi dari program-program dan proyek-proyek yang telah disetujui atau diputuskan dalam tahap pengambilan keputusan. Tahap pelaksanaan ini dapat berupa keikutsertaan secara fisik seperti pemberian tenaga maupun pemberian sumbangan uang dan bahan-bahan material untuk pembangunan.

Perumusan rencana pembangunan juga memerlukan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat baik dari pemerintah maupun masyarakat. dalam

pelaksanaan pembangunan desa, Irwin T. Sander (dalam Supriatna, 2005: h.38) mengemukakan unsur pelaksana pembangunan desa yaitu:

1. *Local leaders* (pemerintah desa),
2. *Community organizer* (pemuka masyarakat, pengurus LKMD, RT/RW, dan lain-lain),
3. *Subject matters specialists* (kader pembangunan desa, penyuluh teknis dan lain sebagainya),
4. *Administrator* (kepala wilayah ditingkat kecamatan sampai tingkat pusat),
5. *Social participation* (partisipasi masyarakat).

Dari uraian diatas terlihat bahwa masyarakat tidak hanya dituntut untuk ikut dalam pembuatan keputusan suatu rencana kegiatan pembangunan, tetapi juga dituntut untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut sehingga pelaksanaan dari kegiatan program dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Masyarakat sebagai sumber pembangunan selain sebagai target pembangunan juga sebagai sumber pelaksanaan pembangunan.

Koentjaraningrat (2004: h.80) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan lebih menekankan kepada kemauan sendiri secara sadar untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pembangunan, disini semua potensi manusia (tenaga kasar dan trampil serta dana) diarahkan bagi pelaksanaan pembangunan baik melalui gotong royong maupun sumbangan sukarela.

Dari uraian-uraian tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan gampong harus bertanggung jawab dalam aktivitas pelaksanaan pembangunan gampong

dengan jalan mengarahkan dukungan tenaga, keterampilan, dana serta fasilitas bagi program pembangunan yang telah ditetapkan dan menciptakan suasana kerja sama dengan pelaksana pembangunan lainnya. Hal ini dapat terwujud apabila masyarakat dipandang sebagai objek sekaligus subjek bagi terlaksananya tujuan pembangunan khususnya bagi tercapainya sasaran dan tujuan dari rencana pembangunan jangka menengah gampong.

Pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, peran serta, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemeliharaan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan; mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal dalam pembangunan; mendorong perkembangan sistem pembangunan yang partisipatif serta meningkatkan dan terpenuhinya sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan prinsip-prinsipnya adalah berpihak terhadap masyarakat, transparansi, partisipasi, desentralisasi, dan kompetisi sehat, namun dalam prakteknya, tidak semua program pembangunan yang menerapkan pendekatan partisipatif berhasil. Gampong Gunong Kleng adalah satu-satunya gampong yang ada di Kecamatan Meureubo yang dianggap berhasil dalam merumuskan rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG).

4.2.1.3 Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pengawasan

Dalam pengertian partisipasi dikatakan bahwa partisipasi akan dilakukan oleh masyarakat apabila memberikan kontribusi langsung terhadap individu atau

kelompok dan apabila tidak maka partisipasi tidak akan terlaksana. Partisipasi akan terjadi apabila ada imbalan yang setimpal dari yang telah dikeluarkan baik berupa tenaga, uang, maupun yang lainnya dari individu atau kelompok masyarakat.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan berupa sumbangan spontan dalam bentuk barang dan jasa (uang), mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan industri/instansi yang berada di luar lingkungan tertentu, mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh komunitas (rapat desa), serta mengadakan pembangunan dikalangan sendiri. Kemudian bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga berupa pengawasan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pengawasan adalah kegiatan yang melihat konsekuensi kebijakan tertentu, bagaimana dan seberapa jauh hasil yang terjadi (Purba, 2005: h.91).

Soekartawi (1990:h. 103) berpendapat pengawasan biasanya dilakukan oleh suatu tim di luar dari anggota pelaksana proyek. Maksudnya, agar pengawasan (*monitoring*) tersebut dapat dilaksanakan tanpa adanya pengaruh dari yang melaksanakan proyek. Alasan lainnya adalah berkaitan dengan pekerjaan masyarakat, dimana seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. pengawasan adalah ukuran atau patokan untuk membandingkan dan menilai

apakah kegiatan yang diawasi itu berjalan sesuai semestinya atau tidak. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah segi daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pekerjaan. Di lain pihak, pengawasan juga dimaksudkan untuk menyusun kebijakan pemberdayaan masyarakat lokal yang bersangkutan guna menghadapi tantangan pembangunan secara menguntungkan.

Tujuan umum pengawasan adalah untuk mengetahui, menggambarkan dan mengevaluasi proses pelaksanaan (purba, 2005: h.95). Sedangkan tujuan khusus adalah untuk:

- a) Mengetahui tingkat eektivitas dan evesiensi pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh.
- b) Mengetahui dan mengukur antara pelaksanaan di lapangan sesuai dengan standar yang diharapkan.
- c) Mengkaji kesesuaian tindakan aktor yang terlibat sesuai fungsinya di semua tingkatan.
- d) Mengetahui gambaran indikasi adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat, baik positif maupun negatif.
- e) Memperoleh rekomendasi kebijaksanaan
- f) Membangun sistem monitoring yang dapat diandalkan untuk program pembangunan yang selanjutnya.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah gampong, mesti terus dapat pengawasan. Pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, badan perwakilan desa (BPD) atau tuha peut mendapatkan pelatihan untuk mengadakan pengawasan pembangunan, khususnya

pembangunan jangka menengah Gampong Gunong Kleng melaksanakan pengawasan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah gampong seperti tuha peut.

Perumusan rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG) Gunong Kleng memiliki kedudukan yang strategis dalam rangka perumusan program rencana pembangunan gampong untuk lima tahun ke depan. Oleh sebab itu perlunya pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan agar hasil yang diharapkan sesuai dengan keinginan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Gampong Gunong Kleng terhadap rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG), bahwa masyarakat Gampong Gunong Kleng pada tahap perencanaan pembangunan jangka menengah Gampong Gunong Kleng menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi masih rendah, hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dan pemberian bentuk aspirasi yang kurang efektif dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengawasan. Keikutsertaan masyarakat terhadap rencana pembangunan jangka menengah gampong yang kurang aktif, karena tidak semua masyarakat ikut serta dengan rencana yang akan disusun karena masyarakat memiliki masing-masing kesibukan. Namun masyarakat memiliki hak yang sepatutnya untuk memberikan aspirasinya dalam proses musyawarah perumusan rencana pembangunan jangka menengah gampong,

5.2 Saran

1. Pemerintah gampong hendaknya berusaha untuk melibatkan seluruh masyarakat, dalam perencanaan pembangunan gampong yang telah direncanakan dalam hal penyusunan RPJMG, tanpa memandang perbedaan kondisi ekonomi sosial di masyarakat.

2. Untuk lebih meningkatkan bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan dalam pelaksanaan pembangunan melalui partisipasi masyarakat, pemerintah setempat hendaknya memberikan pelatihan, penyuluhan atau peningkatan kemampuan masyarakat, sehingga masyarakat merasa benar-benar terlibat dalam program ini.
3. Untuk mengawasi proses pembangunan gampong, hendaknya pemerintah gampong menunjuk saja salah satu dari perwakilan masyarakat. Kemudian untuk melancarkan pengawasan pembangunan maka perlunya pelatihan kepada masyarakat atau aparat gampong yang melaksanakan pengawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Budiman, Arief. 2006. *Teori Pembangunan Dunia Ke Tiga*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cahyono, 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cohen and Uphoff. 2007. *An Introduction To Social Planning In The Third World*. By Jhon Wilet & sons Ltd, 1994, Terjemahan Drs. Susetiawan. SU: “ Perencanaan Sosial di Dunia Ke Tiga : suatu Pengantar”. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Fitriastuti, Nurwi Mayasri, 2005. *Penjaringan Aspirasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, (Studi Optimalisasi Fungsi DPRD)*. Tesis, Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Huberman, Michael dan Miles. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. UI Pres. Jakarta.
- Hall, et all. 2006. *Community Participation, Social Development and State*. London, Methven & Co.
- Iqbal, Hasan, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Juned, T. M. 2003. *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*. Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2004. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong, J Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosydakarya.
- Moh, Nasir. 2005. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- M. Puteh, Jakfar. 2012. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Grafindo Litera Media. Jakarta.
- Ndaraha, Taliziduhu. 2002. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Di Beberapa Desa*. Yayasan Karya Dharma, IIP, Jakarta.

- Nasution, Zulkarimen, 2008. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan teori dan penerapannya*. Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sastropoetro, Santoso. RA. 2008. *Partisipasi, Komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan Nasional*. Alumni. Bandung.
- Suryono, Agus. 2001, *Teori dan Isu Pembangunan*, Universitas Malang Press, Malang.
- Sugiyono, 2007. *Statistik Nonparametrik Untuk Penelitian*. (Cetakan kelima). Alfabeta. Bandung.
- Siagian, Sondang. 2000. *Administrasi pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sayumitra, Andi. 2009. *Implementasi Perencanaan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pembangunan di Desa Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat*. Skripsi Fisip, Universitas Sumatra Utara. Medan.
- Slamet, Y. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soetomo.2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sufi, Rusdi, dkk, 2002, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.
- Taqwaddin. 2009. *Gampong Sebagai Basis Perdamaian Di Aceh*, Makalah, Banda Aceh, 31 Januari 2009.
- Todoro, Michael, P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga*, Erlangga, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001. *Manajemen Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan aceh.
- Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong.

PEDOMAN WAWANCARA

Variabel Aparatur

1. Apa yang bapak/ibu ketahui mengenai RPJMG?
2. Bagaimana bentuk RPJMG?
3. Bagaimana cara penyusunan RPJMG?
4. Siapa saja yang ikut dalam penyusunan RPJMG?
5. Apakah bapak/ibu ikut terlibat dalam penyusunan RPJMG?
6. Dalam hal apa masyarakat itu dilibatkan? Apakah masyarakat perlu dilibatkan dalam penyusunan RPJMG?
7. Kenapa masyarakat itu perlu dilibatkan?
8. Bagaimana cara anda melibatkan masyarakat dalam penyusunan RPJMG?
9. Kalau menurut bapak, apakah perlu dilibatkan semua masyarakat dalam penyusunan RPJMG?

Variabel Masyarakat

1. Apa manfaat dan keuntungan bagi masyarakat jika ikut serta dalam penyusunan RPJMG?
2. Siapa yang melibatkan/ibu dalam penyusunan RPJMG?
3. Kapan anda dilibatkan dalam penyusunan RPJMG?
4. Bagaimana anda melihat masyarakat dari berbagai pandangan tentang partisipasi masyarakat?
5. Apakah pada saat RPJMG dimusyawarahkan, anda ikut serta?
6. Apakah anda ikut terlibat dalam rencana pembangunan jangka menengah gampong pada tahap perencanaannya.?



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN MEUREUBO
GAMPONG GUNONG KLENG

Jalan Meulaboh-Tapak Tuan Km 8

Gunong Kleng, 21 Februari 2013

Nomor : /GGK/III/AB/2013
Lamp : -
Perihal : Keterangan Penelitian
Untuk Penyusunan Skripsi

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Negara
Fisip- UTU
di-
Tempat

1. Sesuai dengan surat Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar nomor: 024/FIS-UTU/D/PL/VI tanggal 19 Juni 2012 tentang permohonan izin penelitian lapangan (Skripsi) di Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MARLIANA**
Nim : 06C20201059
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

2. Benar yang bersangkutan di atas telah melaksanakan penelitian di Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo dengan judul Skripsi yaitu: **Analisis Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG)**.
3. Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui,
Keuchik Gampong Gunong Kleng

NORMAN

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Marlina
Tempat/Tanggal Lahir : Gunong Kleng, 02 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
Status : Kawin
Alamat : Gampong Gunong Kleng
Hp : 085359858858

Nama Orang Tua

a. Ayah : Zakaria
b. Pekerjaan : Tani
c. Ibu : Rahima
d. Pekerjaan : IRT
e. Alamat : Gampong Gunong Kleng

Pendidikan

- a. SD : SDN Gunong Kleng
- b. SMP : SLTPN 2 Meulaboh
- c. SMA : SMAN 4 Meulaboh
- d. PERGURUAN TINGGI : Universitas Teuku Umar Alue Peunyareng

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ttd

MARLIANA